
Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Trisna Damayanti
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
trisnadamayanti2805@gmail.com
+6281907333253

ISSN: 2963-8933
Vol. 4, No. 2, Juni 2025
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

Kamarudding Sellang
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
kamaruddinsellang@yahoo.co.id

Andi Uceng
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
andiuceng@yahoo.com

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Damayanti, T., Sellang, K., & Uceng, A. (2025). Implementasi Kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 4 (2),101-107.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang serta mengidentifikasi faktor yang menjadi Penghambat pengimplementasian kartu keluarga sejahtera (KKS). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melibatkan 37 responden yang dipilih melalui tehnik simple random sampling dari total 237 penerima KKS pada bulan Januari-Mei 2025. Variabel Penelitian meliputi Implementasi Program KKS (X) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y). Data dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, dan kuesioner. Kemudian dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kartu keluarga sejahtera berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan hasil presentase masing-masing sebesar 66% dan 68%. Faktor yang menjadi penghambat terdapat dua faktor utama yaitu, ketidakjelasan instruksi dengan presentase 52% dan keterbatasan sumber daya dengan presentase 52% kedua faktor tersebut berada pada kategori kurang baik. Uji ANOVA didapatkan Fhitung sebesar 28.879 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan uji t menunjukkan thitung (5.374) > ttabel (2.026) artinya impelemntasi program KKS berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai R Square sebesar 45% menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi, Porgram Kartu Keluarga Sejahtera dan kesejahteraan masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Family Welfare Card (KKS) program to improve community welfare in Pangkajene Village, Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency and to identify the factors that inhibit the implementation of the Family Welfare Card (KKS). The method used is quantitative descriptive involving 37 respondents selected through simple random sampling techniques from a total of 237 KKS recipients in January-May 2025. Research variables include the Implementation of the KKS Program (X) and Community Welfare (Y). Data were collected through observation, literature studies, and questionnaires. Then analyzed using the IBM SPSS 26.0 application. The results of this study indicate that the implementation of the Family Welfare Card program has a significant effect on improving community welfare with percentage results of 66% and 68% respectively. There are two main inhibiting factors, namely unclear instructions with a percentage of 52% and limited resources with a percentage of 52%, both of which are in the less good category. The ANOVA test obtained F count of 28,879 with a significance level of 0.000, while the t test showed t count (5,374) > t table (2,026) meaning that the implementation of the KKS program had a significant effect on improving community welfare. The R Square value of 45% indicates that it is influenced by other variables outside this study.

Key Words: Implementation, Family Welfare Card Program, and community welfare

A.Pendahuluan

Negara kesejahteraan adalah konsep di mana pemerintah bertanggung jawab penuh atas jaminan kesejahteraan warganya. Untuk mencapai hal ini, kebijakan sosial menjadi esensial, berfokus pada perlindungan dan penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan. Kesejahteraan sosial sendiri didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, memungkinkan warga negara hidup layak, mengembangkan diri, dan menjalankan fungsi sosialnya. Sayangnya, masyarakat miskin seringkali terperangkap dalam siklus kemiskinan akibat keterbatasan akses ekonomi dan sosial, yang bahkan memaksa anak-anak untuk turut menanggung beban ekonomi keluarga.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan warga negara baik secara material, spiritual, maupun sosial agar mereka dapat hidup secara layak, mengembangkan potensi diri, serta menjalankan peran sosialnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Menghadapi tantangan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang persisten, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inisiatif strategis adalah peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Kementerian Sosial pada April 2016, yang disalurkan melalui PT. POS. KKS merupakan program kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya pasca kebijakan kenaikan harga BBM. Kehadiran KKS diharapkan dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 541/3150/SJ yang mengatur pelaksanaan dan distribusi Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera sebagai pengganti KPS dari APBN 2014.

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses yang terdiri dari berbagai tindakan terstruktur untuk mencapai hasil sebagaimana ditetapkan dalam rumusan kebijakan. Proses ini bukan sekadar rangkaian prosedur birokratis, melainkan turut dipengaruhi oleh kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Oleh sebab itu, implementasi melibatkan partisipasi aktif dari individu, aparat pemerintahan, dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan sasaran kebijakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Jones, 1991:295), implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi antara seperangkat tujuan dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapainya. Pelaksanaan kebijakan menjadi

bagian dari jaringan yang tidak tampak secara kasat mata, di mana implementasi mencakup kemampuan membangun keterkaitan berkelanjutan antara tindakan dan hasil yang diinginkan.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, juga menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu masyarakat. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) pada Maret 2024 adalah 15.480 orang, dengan persentase 5,02%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2023, yaitu 15.750 orang dengan persentase 5,14%. Program Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai berkontribusi signifikan dalam pencapaian ini. Meskipun demikian, tantangan masih ada. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat KKS (pengimplementasian KKS) secara optimal dan faktor-faktor yang menghambat peningkatan kemiskinan secara lebih luas.

Salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu ini berfungsi sebagai sarana bersama untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang penyalurannya terintegrasi melalui Kartu KKS. (Kemensos.go.id, 2025).

Pemerintah memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi utama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Melalui KKS, bantuan diberikan dalam beberapa bentuk, di antaranya:

(1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan yang disalurkan tanpa menggunakan uang tunai secara langsung, melainkan melalui kartu elektronik yang diterima oleh KPM. Penyaluran dilakukan via sistem perbankan dan dapat digunakan untuk memperoleh bahan pangan seperti beras dan/atau telur di e-Warong, sekaligus membantu meningkatkan kecukupan gizi. 2) Selain BPNT, KKS juga mencakup Program Keluarga Harapan. Pada hakikatnya, penerima KKS yang telah tercatat sebagai KPM terdaftar akan masuk dalam KPM penerima PKH secara otomatis. Penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening bank yang dapat diakses melalui buku tabungan. Sementara itu, KKS juga berfungsi sebagai rekening tabungan dan angsel sekaligus dompet elektronik yang digunakan sebagai sarana penerima semua jenis bantuan sosial. PKH merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai bagi keluarga miskin tertentu yang dikenai syarat, antara lain: memiliki anak usia dini, memiliki anak satu orang antara 7 sampai 15 tahun yang tidak tamat pendidikan dasar, ibu hamil atau bersalin, lansia di atas 70 tahun, dan penyandang tuna netra serta disabilitas berat.

Selain itu peneliti Richard Matland, dengan Model Matriks Ambiguitas-Konfliknya, berfokus pada bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan dan seberapa efektif penerjemahan tersebut. Empat indikator "ketepatan" yang digunakannya yaitu: (1) Ketepatan kebijakan, (2) Ketepatan Pelaksanaan, (3) Ketepatan Target, dan (4) Ketepatan Lingkungan. Pendekatan ini jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi akademik baru dalam studi administrasi publik, terutama terkait implementasi program KKS.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat data dari pendamping PPM mengindikasikan bahwa dari 54.291 jiwa penduduk Kecamatan Maritengngae, sebanyak 587 jiwa masih tergolong miskin ekstrem. Peneliti menyimpulkan tentang penyebab adanya hal tersebut di karenakan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat Program Kartu Keluarga Sejahtera tidak meningkat di karenakan kurang terimplementasinya Program Keluarga Harapan atau bisa dikatakan implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Pangkajene belum optimal. Selain itu, observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih terbatas, mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi. Akibatnya, pemanfaatan KKS seringkali belum optimal dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian, meskipun KKS memberikan kontribusi bagi keluarga kurang mampu, efektivitas program ini masih memerlukan perbaikan signifikan agar dapat mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kartu keluarga sejahtera (KKS) terhadap peningkatan kesejahteraan di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat? (2) Faktor apa yang menjadi penghambat implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam pengimplementasian kesejahteraan masyarakat?. Dengan demikian penelitian ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih lepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

B. Metodologi

Metode penelitian dalam studi ini dirancang untuk menganalisis implemantasi program Kartu Keluarga Sejahtera terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deksriptif, yang yang bertujuan untuk meberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae dengan pemilihan lokasi yang didasarkan pada adanya permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat , seperti bertambah nya masyarakat miskin yang sesuai berdasarkan data dari pendamping PPM dan hamabatan hambatan yang terjadi. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, dari Mei 2025 hingga Juli 2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah Penerima KKS Kelurahan Pangkajene sebanyak 237 orang pada bulan Januari-Mei 2025. Menurut Sugiyono (2001:57), simple random sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dari seluruh anggota populasi, tanpa membedakan kelompok atau tingkatan tertentu dalam populasi tersebut. Sementara itu, Arikunto (2012:104) menjelaskan bahwa bila jumlah populasi tidak mencapai 100 orang, maka keseluruhan populasi dapat dijadikan sampel. Namun, jika populasinya melebihi 100 orang, maka cukup diambil sebagian, yaitu antara 10% sampai 25% dari total populasi.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

yaitu:

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Tingkat kesalahan error (15%)

$$n = \frac{237}{1 + 237 \cdot 0.15^2}$$

$$n = \frac{237}{1 + 237 \cdot 0.0225}$$

$$n = \frac{237}{6.3325} \approx 37.42$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka peneliti mengambil sampel pada penelitian ini adalah sebesar 37 Responden.

Menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni; 1) Observasi, dengan mengamati secara langsung proses implementasi program KKS untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti masih banyaknya masyarakat kurang mampu, ketidaktepatan penentuan target penerima manfaat, dan hambatan dalam pelaksanaan program 2) Kuesioner, yang terdiri pertanyaan terstruktur terkait implementasi program dan kesejahteraan masyarakat dan 3) studi kepustakaan, dengan merujuk pada buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait.

Teknik analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 26.0 dengan tahapan; 1) Uji validitas dan reliabilitas untuk kaekuratan dan konsistensi instrumen penelitian 2) Analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan variabel penelitian 3) Uji ANOVA untuk mengidentifikasi pengaruh implementasi program KKS terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 4) Regresi linear sederhana untuk menunjukkan bahwa implementasi program KKS memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat .

C. Hasil dan Pembahasan

Penlitian ini bertujuan menganalisis implemantasi kartu keluarga sejahtera (KKS) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kartu keluarga sejahtera memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai R^2 sebesar 45% yang menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Namun terdapat dua faktor penghambat yang masih perlu dianalisis yaitu ketidakjelasan instruksi dan keterbatasan sumber daya yang memiliki tingkat presentase 52%. Temuan memberikan bukti empiris bahwa implementasi KKS memiliki kontribusi yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya tingkat kelurahan.

a) Indikator Implementasi Kebijakan

- a) Tepat Kebijakan : sebanyak 70% responden menilai bahwa tepat kebijakan dalam pengimplementasian program KKS sudah berada dalam kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa Tepat Kebijakan mengacu pada tingkat kesesuaian antara tujuan kebijakan dan implementasinya di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.
- b) Tepat Pelaksanaan : sebanyak 68% yang menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya tepat pelaksanaan dalam implementasi program KKS. Namun hasil dari tepat pelaksanaan sedikit lebih rendah dibandingkan tepat kebijakan, bahwa meski kebijakan sudah baik, optimalisasi implementasi perlu ditingkatkan untuk dampak maksimal.
- c) Tepat Target : Sebanyak 66% responden menilai sasaran program KKS sudah tepat. Angka ini menunjukkan sesuai dengan target yaitu masyarakat kurang mampu di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, namun masih ada peluang untuk meningkatkan akurasi penargetan agar bantuan lebih merata sarannya dan efektif.
- d) Tepat Lingkungan : indikator ini menunjukkan bahwa 60% responden merasakan kesesuaian lingkungan, serta kondisi sosial masyarakat dengan pelaksana implementasi KKS. Dinamika sosial dan pemangku kepentingan masih bisa dioptimalkan.

Dari penjelasan hasil implementasi Program KKS menunjukkan bahwa kebijakan telah dirancang dengan baik dan sesuai dengan masalah yang ada. Namun, pelaksanaannya dan akurasi penargetan masih perlu dioptimalkan agar manfaat program dapat lebih merata dan efektif di lapangan.

b) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

- a) Material : Presentase 66% menunjukkan bahwa responden menilai pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) sudah cukup baik dalam pemenuhannya. Material ini mencerminkan bahwa bantuan KKS telah berkontribusi terhadap kebutuhan dasar.
- b) Spiritual : Presentase kepuasan 70% menunjukkan bahwa responden menilai kebutuhan spiritual (fisik, mental, sosial) sudah terpenuhi dengan baik. Tingkat kepuasan telah berkontribusi secara positif terhadap ketenangan dan psikologis penerima KKS.
- c) Sosial : Presentase 68% menunjukkan bahwa responden menilai interaksi atau tingkah laku antara dua orang atau lebih sudah cukup baik. Bahwa implementasi KKS telah mendukung interaksi positif dan keterlibatan penerima manfaat dalam lingkungan sosial.

d) Indikator Faktor yang menghambat Implementasi Program KKS

- a) Presentase 68% menunjukkan bahwa banyaknya titik keputusan sudah cukup baik dalam pengelolaan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa titik keputusan, prosesnya tidak terlalu menghambat dan tujuan program dapat dicapai.
- b) Disposisi Pelaksana : Presentase 64% menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana sudah cukup baik. Ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen petugas mendukung implementasi program.
- c) Ketidakjelasan instruksi : Presentase 52% menunjukkan bahwa ketidakjelasan instruksi menjadi penghambat yang signifikan, menyebabkan penafsiran kebijakan secara berbeda beda.
- d) Keterbatasan Sumber Daya : Presentase 52% menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi penghambat yang signifikan dalam implementasi program KKS, dengan kurangnya dana, waktu, atau tenaga kerja yang menghambat efektivitas pelaksanaan program.
- e) Koordinasi : Presentase 68% menunjukkan bahwa koordinasi sudah cukup baik. Ini menjelaskan bahwa adanya keselarasan antara lembaga dan aktor yang

Hasil pengujian hipotesis pertama mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di wilayah Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah mencapai kategori sangat baik dalam kaitannya dengan standar ideal yang diharapkan. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan program tersebut secara konsisten berkontribusi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Pada Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Penelitian ini sejalan dengan temuan Harry Simon Nababan (2023), bahwa implementasi KKS berjalan baik meskipun akurasi target perlu ditingkatkan. Sementara itu, Resky Anjas (2022) menunjukkan implementasi PKH belum optimal karena lemahnya koordinasi, mendukung temuan skripsi ini terkait keterbatasan instruksi dan sumber daya.

Studi Intan Ardhya Pramesti (2023) menyoroti problematika BPNT sebagai bagian dari KKS, senada dengan kendala teknis yang ditemukan dalam penelitian ini. Sedangkan Andela Anggelani (2018) menilai pelaksanaan KKS belum efektif, berbeda dengan penelitian ini yang menyimpulkan program berjalan baik dengan dukungan bukti kuantitatif dan uji ANOVA.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program KKS memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera berpengaruh/signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan $< 0,05$. Dengan demikian hipotesis penelitian ini dapat diterima atau dengan kata lain H_0 diterima H_1 ditolak. Nilai presentase dari indikator implementasi (X) adalah 66% berada pada kategori Baik dan nilai presentase dari indikator kesejahteraan masyarakat (Y) adalah 68% berada kategori Baik, sedangkan sisanya 34% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Implementasi program KKS mengalami hambatan utama dalam keterbatasan sumber daya dan ketidakjelasan instruksi, tetapi hambatan lainnya masih berada pada tingkat baik, namun juga harus lebih diperbaiki lagi. Presentase dari indikator faktor yang menghambat implementasi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae adalah 61% berada pada kategori "Baik". Namun masih terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian terutama disebabkan oleh instruksi yang tidak jelas dan keterbatasan sumber daya. Meskipun koordinasi dan Disposisi pelaksana relatif lebih baik, kedua faktor ini tetap menjadi kendala yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan program secara optimal.

Pelaksanaan program diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Khususnya di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, pelaksanaan program perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan tepat sasaran agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan

Untuk lebih memperhatikan hambatan yang ada bagi petugas dan pendamping Program Kartu Keluarga Sejahtera diharapkan proaktif mengarahkan serta membimbing keluarga penerima manfaat. Tujuannya adalah menumbuhkan kemandirian, mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan memastikan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan melalui evaluasi berkala dan perumusan solusi tepat. Disarankan agar penelitian lebih lanjut mengkaji program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang dijalankan pemerintah untuk mengetahui program mana yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan, khususnya di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae.

E. Referensi

- Ahmad, J. . (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi*.
Jamaluddin, A. (2015). Metode Penelitian Sosial. In *Metode Penelitian Sosial*. Makassar: Deepublish,

- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik* (Cetakan Pertama). Brilliant.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rustam, A., Sari, E. D., & Yunita, L. (2018). *Statistika dan pengukuran pendidikan: analisis menggunakan SPSS, Itean dan Lisrel*. PT. Ilham Sejahtera Persada.
- Alfiah, A. (2019). *Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Pkh Di Tangerang Selatan*.
- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(1), 24–39. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.3>
- Anggraini, D. (2023). *Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Versus Pt Pos Indonesia Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*.
- Anggun Nurul Chasanah, & Almisar Hamid. (2024). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 53–67. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.917>
- Cendekia Jaya, J. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. *CENDEKIA Jaya*, 2(1), 75–93. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i1.64>
- Graham, A. (2005). Pressman/Wildavsky and Bardach: Implementation in the public sector, past, present and future. *Canadian Public Administration*, 48(2), 268–273. <https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.2005.tb02191.x>
- HASTIRANI, H., SELANG, K., & LUKMAN, L. (2021). Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 78–83. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i2.475>
- Jasin, M., Rippi, K., & Wahyuti, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo*. 4, 9329–9341.
- Kemensos.go.id. (2025). *Kementrian Sosial Republik Indonesia*. Kemensos.Go.Id. <https://kemensos.go.id/#>
- Matland, R. E. (1995). Public Management Research Association Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Public Administration Research and Theory: J-PART*, 5(2), 145–174.
- Nisra, N., Uceng, A., Sapri, S., & L, S. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 90–97. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i2.476>
- Nurbaena, W. O. W. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Melalui Wadah Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 20–27. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i2.819>
- Pdam, M., & Luwu, K. (2020). *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3 , No . 2 , Oktober 2020 Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*. 3(2), 61–71.
- Resky Anjas. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*. 53–54.
- Tuhumury, J. J., Kotarumalos, A. F., & Latuconsina, N. (2023). Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waeheru Kota Ambon. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(1), 51–58.
- Yusuf Hidayat, Laila Azkia, M. R. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5457>